BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji bagaimana perjuangan kolektif yang dilakukan oleh Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) merepresentasikan praktik politik pengakuan dalam memperjuangkan hak cipta atas musik di tengah dominasi industri digital. Dalam kondisi ketimpangan struktural dan lemahnya penegakan hukum, FESMI tampil sebagai aktor sipil yang memainkan peran penting dalam mengartikulasikan kepentingan musisi terhadap negara dan publik. Perjuangan mereka tidak hanya dilakukan melalui jalur legal formal, tetapi juga melalui berbagai bentuk kampanye, komunikasi digital, advokasi kebijakan, dan konsolidasi komunitas yang berorientasi pada pengakuan profesi musisi sebagai subjek hukum dan kultural yang sah.

Berdasarkan temuan penelitian, menunjukkan bahwa strategi perjuangan FESMI bersifat adaptif dan berbasis pada fleksibilitas organisasi. FESMI tidak memaksakan kesatuan struktural di kalangan musisi, melainkan menyediakan platform inklusif bagi berbagai aktor untuk terlibat sesuai kapasitas dan konteksnya. Model mobilisasi ini memperlihatkan bagaimana solidaritas dapat dibangun melalui jaringan sosial, legitimasi simbolik, serta kesadaran kolektif yang tumbuh dari pengalaman ketidakadilan bersama. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menghadirkan ruang partisipasi yang lentur namun berdaya dorong kuat dalam upaya perubahan struktural atas kebijakan hak cipta.

Dalam kerangka teori politik pengakuan yang dirumuskan oleh Axel Honneth, perjuangan FESMI mencerminkan tiga bentuk pengakuan utama: cinta sebagai afeksi emosional Bersama di antara musisi, pengakuan hukum sebagai subjek yang sah dalam penegakan sistem Undang-Undang Hak Cipta, serta penghargaan sosial melalui kerja advokatif dan kampanye publik. Melalui kombinasi ketiganya, FESMI tidak hanya menuntut redistribusi hak ekonomi melalui royalti, tetapi juga reposisi status sosial dan martabat profesi musisi yang selama ini diam-diam dilemahkan. Ini menunjukkan bahwa perjuangan hak cipta bukan sekadar soal regulasi ekonomi, tetapi juga menyangkut dimensi eksistensial dari keberadaan pencipta.

117

Dari perspektif mobilisasi sumber daya, keberhasilan FESMI juga menunjukkan

pentingnya kapasitas organisasi dalam mengelola jaringan, sumber daya informasi, dukungan

politis, dan keahlian teknis. FESMI mampu memanfaatkan peluang politik melalui partisipasi

dalam RDPU, FGD, dan ruang-ruang publik lainnya, sekaligus memperkuat narasi advokasi

melalui media sosial dan riset kebijakan. Sejalan dengan keberlanjutan bahwa perjuangan

kelompok musisi tidak hanya bergantung pada kekuatan hukum formal, tetapi juga pada

kemampuan organisasi untuk menjembatani aspirasi komunitas dengan proses-proses

pengambilan keputusan dari tingkat taraf terendah hinnga negara.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa perjuangan FESMI dalam

memperjuangkan pengakuan hak cipta atas musik merupakan bentuk praktik politik pengakuan

yang berakar pada pengalaman ketimpangan struktural dan dijalankan melalui strategi

mobilisasi sumber daya yang responsif dan berbasis komunitas. Keberhasilan gerakan ini

menunjukkan bahwa di tengah lemahnya regulasi dan fragmentasi komunitas musisi,

solidaritas yang dibangun secara lentur namun kolektif tetap dapat menjadi kekuatan

perubahan. Perjuangan FESMI membuka ruang baru bagi organisasi masyarakat sipil dalam

memperjuangkan hak-hak budaya dan ekonomi di era digital, sekaligus menawarkan model

advokasi berbasis pengakuan yang dapat diaplikasikan dalam konteks gerakan sosial lainnya

di Indonesia.

5.2 SARAN

Bagian saran disusun untuk memberikan kontribusi dalam dua ranah. Pertama, saran

praktis ditujukan kepada pemerintah, organisasi profesi, dan komunitas musisi agar mampu

merespons tantangan regulasi hak cipta secara lebih inklusif dan adaptif terhadap

perkembangan teknologi. Kedua, saran teoritis ditujukan bagi pengembangan kajian akademik,

khususnya dalam memahami dinamika gerakan sosial berbasis profesi kreatif melalui

pendekatan politik pengakuan dan mobilisasi sumber daya. Kedua bentuk saran ini diharapkan

dapat memperkaya praktik dan teori dalam upaya memperjuangkan hak-hak dan tantangan di

era digital.

5.2.1 Saran Praktis

118

Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, penting untuk memastikan bahwa proses

revisi dan implementasi Undang-Undang Hak Cipta dilakukan secara partisipatif, dengan

melibatkan organisasi seperti FESMI, akademisi, dan komunitas kreatif lainnya. Regulasi yang

dihasilkan harus menjamin perlindungan yang setara bagi pencipta, serta mengatur distribusi

royalti secara adil dan transparan. Pemerintah juga perlu merespons secara proaktif tantangan

baru yang muncul dari perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan.

Bagi FESMI dan Organisasi serupa, disarankan untuk terus memperkuat strategi

mobilisasi komunitas melalui peningkatan literasi hukum, pelatihan advokasi, serta

pengembangan jejaring lintas sektor. Konsolidasi internal juga perlu ditingkatkan untuk

menjaga kesinambungan gerakan, terutama dalam menghadapi dinamika politik dan perubahan

teknologi digital.

Bagi Musisi dan Pelaku Kreatif, penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap

pentingnya hak cipta sebagai bagian dari pelaku industri. Keterlibatan aktif dalam organisasi

profesi dan advokasi publik menjadi bagian dari upaya kolektif untuk menciptakan ekosistem

musik yang adil, berkelanjutan, dan saling menghargai.

5.2.2 Saran Teoritis

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan teori politik pengakuan dapat diterapkan

secara efektif dalam konteks studi gerakan sosial berbasis profesi kreatif. Oleh karena itu,

kajian masa depan dapat memperluas penggunaan teori ini untuk menganalisis perjuangan

kelompok lain, seperti seniman visual, penulis, atau pekerja kreatif digital.

Teori mobilisasi sumber daya juga terbukti relevan dalam memahami dinamika

organisasi masyarakat sipil dalam konteks non-politik formal. Penelitian selanjutnya dapat

mengembangkan pendekatan ini untuk mengkaji bagaimana organisasi berbasis komunitas

memanfaatkan sumber daya simbolik, sosial, dan digital dalam memperjuangkan hak-hak

kultural dan ekonomi di era teknologi informasi.

119